

TRADISI DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS BANGSA INDONESIA DI ERA MODERN

Oleh: Saefurrohmat dan Bambang Syaeful Hadi^{*)}

ABSTRACT

The Indonesian government has often placed the tradition in the periphery of the process of modernization because it follows the way modernization is run by the Western civilization, believing in the three-phase law of myth-religion-modernity. This article analyzes the role of tradition in national development in the modern era.

Modernization involves many aspects, not only technological and economic ones but also those related to the cultural system such as politics and the socio-culture. When England was successful in the modernization resulting in the Industrial Revolution, it was not recognized as a real revolution because it did not change an old regime and create a modern state. The West claims that modernization applied more to the French Revolution of 1879 because it was supported by ideologies created by the people and it created a modern state. Then, in the past, the roles of ideologies were taken over by tradition. It is a fact that tradition is able to be reinterpreted in the modern era. For instance, Japan has been able to become a modern state in a short time because the modernization of the country has been done by means of tradition, which consists of the country's system of knowledge and

^{*)} Staf Pengajar pada Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY.

ways and forms a national identity which has functioned coping with the problems in the process of modernization.

The majority of the people support tradition. Both tradition and modernization are related to the economic system; consequently, both should run harmoniously in order to create a great reformation in society. The political elite should not use modernization to achieve their own political purposes because it will then mean that they are ignoring the majority of the people.

Key words: tradition, modernization, the West, Indonesian, reformation.

PENDAHULUAN

Kelompok sekuleris di Barat yakin pada hukum tiga tingkatan mitos-Kagama-modern. Pandangan tersebut juga banyak diikuti oleh orang Indonesia yang berkiblat ke Barat, terutama mereka yang kurang mendalam pengetahuan agamanya dan mereka dari kelompok organisasi agama sayap modernis. Sikap mereka terkadang tidak akomodatif terhadap kelompok tradisional, sehingga menimbulkan ketegangan di masyarakat. Hal tersebut berekses pada tidak adanya kerjasama sesama anggota masyarakat yang berbeda aliran tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif.

Pemerintah Indonesia juga tampaknya mengikuti jejak yang telah dilalui oleh Barat dalam proses modernisasi. Pemerintah menempuh kebijakan tersebut karena didorong oleh faktor pluralitas agama di Indonesia dan mendapatkan justifikasi dalam dasar negara Pancasila. Akan tetapi semboyan *Bhineka Tunggal Ika* tampaknya tidak mendapatkan tempat yang subur dalam proses perkembangannya, sehingga yang berkembang bukan konsep persatuan tetapi kesatuan melalui program pembangunan

(modernisasi) yang sentralistik. Modernisasi berjalan dari atas dan yang lebih parah lagi modernisasi seringkali dijadikan alat politik oleh sekelompok elit politik yang ingin menahan gerak laju dari kelompok tradisionalis. Penguasaan sumber-sumber ekonomi dan alat-alat produksi oleh sekelompok elit tersebut menjadikan massa dari kelompok tradisionalis tidak berdaya dalam menjawab tantangan hidup di era modern. Kenyataan tersebut tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dalam mengejar ketertinggalannya dari Barat.

Akibat dari kebijakan yang mengikuti jejak Barat tersebut maka ekseseks dari peradaban Barat juga menimpa bangsa Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak banyak belajar dari fakta sejarah. Fakta menunjukkan bahwa modernisasi bukan hanya sekedar masalah ekonomi, tetapi menyangkut masalah budaya. Dengan demikian modernisasi di Barat berbeda dengan modernisasi di Indonesia karena adanya perbedaan tradisi/budya. Karenanya tidak mengherankan bila krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997 masih belum teratasi, karena modernisasi di Indonesia tidak berdasarkan tradisi bangsa yang menjadi identitasnya. Krisis dunia tidak berdampak luas di Jepang, India, dan China karena mereka melakukan modernisasi dalam rangka mengembangkan tradisi supaya lebih rasional (Halimi, 1998: 11).

Tulisan ini akan membahas permasalahan tradisi dari sudut pandang sejarah perkembangannya, sehingga dapat diketahui perbedaan tradisi yang sudah menjadi institusi sosial mapun tradisi yang menyampaikan pesan-pesan abadi dan universal. Tradisi bersifat dinamis dan dapat dilakukan reinterpretasi, yang memungkinkan tradisi menjadi kompatibel dengan modernisasi dan sekaligus dapat mengatasi ekseseks peradaban Barat.

Tradisi di Era Modern

Hukum tiga tingkatan mitos-agama-modern bukanlah merupakan pentahapan yang baku. Sebagai suatu kategorisasi/periodisasi dalam Ilmu Sosiologi, sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya termasuk Ilmu Sejarah, periodisasi tidak bersifat mutlak, dimana berakhirnya suatu periode akan diikuti secara otomatis berakhirnya karakteristik periode tersebut dalam periode selanjutnya; karena penyusunan suatu periode dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami spirit/jiwa (*mainstreams*) suatu zaman. Hukum tiga tingkatan yang diantaranya dipakai oleh Auguste Comte (1798-1857) dan Emile Durkheim (1858-1917) lahir dari perut *the Philosophy of Enlightenment* (Filsafat Pencerahan) : suatu gerakan filsafat abad ke-18 yang meyakini kemampuan akal manusia untuk mengatasi segala persoalan hidup. Gerakan ini muncul karena kefrustasian terhadap agama (kristen) yang membelenggu kebebasan berfikir dan bertentangan dengan rasio, sehingga saat itu dunia Barat berada dalam masa kegelapan (*jahiliyah*) dalam arti sebenarnya.

Periode ilmu/modern dimulai sejak Zaman Renaissance (abad ke-15), yang ditandai oleh usaha untuk mendiskreditkan agama (khususnya kristen) yang dianggap telah mengekang kebebasan akal manusia dan berekses pada tertinggalnya Barat dari Dunia Islam. Zaman Renaissance menandai suatu revolusi dalam sejarah umat manusia karena gereja sebagai penguasa masyarakat, saat itu sudah tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh lagi dengan berkembangnya ilmu dan teknologi modern. Adapun Zaman Renaissance sebagai awal zaman ilmu/modern memiliki ciri-ciri ingin menggantikan “wahyu” (bibel) dengan akal, teologi dengan ilmu, kebudayaan teosentris dengan antroposentris, dan kebudayaan kristen dengan paganisme.

Durkheim, sang pendiri sosiologi modern, mengatakan bahwa di era modern agama mempunyai peranan yang kurang penting dan agama hanya berperan sebagai masa transisi dari era mitos dengan era modern. Lebih lanjut Durkheim yakin bahwa agama bukanlah suatu kepercayaan terhadap Tuhan yang berakar dari ketakutan, melainkan suatu wujud ketergantungan manusia terhadap masyarakat karena manusia belum mampu menggunakan akalunya secara optimal sehingga masyarakat merupakan *god hypostasis* (Pickering, 1975 : 326). Dia hanya mengakui bahwa agama telah berperan sebagai ideologi yang efektif di masa lampau karena agama telah mampu membimbing kehidupan umat manusia dan telah mendefinisikan '*pleasure of the future*', namun dia yakin bahwa era agama sudah berakhir karena *creative effervescence* (spirit suatu zaman) hanya sekali terjadi (Dabashi, 1993 : 486).

Penetapan era sekarang ini sebagai zaman modern tidak otomatis berakhirnya peranan agama di Barat, hal ini pula yang membuktikan berlakunya hukum Karl Marx *thesis-antithesis-synthesis*. Lahirnya zaman Renaissance di-*counter* oleh munculnya Zaman Reformasi, yakni sebuah gerakan yang ingin menggantikan teologi lama dengan teologi baru dalam Kristen yang dipelopori Martin Luther. Selanjutnya muncul Zaman Kontra-Reformasi sebagai *counter* terhadap zaman Reformasi. Begitulah Karl Marx menemukan justifikasinya (Kuntowijoyo, 1999b : 44-46). Memang peranan ideologi tidak mudah dihindari, sebaliknya kaum sekuler berusaha membuat ideologi baru yang didasarkan tidak pada agama melainkan pada *Philosophy of Enlightenment*. Ilmu dijadikan alat untuk menyusun suatu ideologi Westernisasi, padahal sebenarnya ilmu sebagai ciri dari era modern bersifat netral dan bukanlah menjadi karakteristik Barat. Westernisasi merupakan suatu ideologi untuk menanamkan perasaan superioritas Barat terhadap belahan bumi lainnya, sehingga Barat merasa memiliki "misi suci" melalui

gerakan pasifikasi/asimilasi kebudayaan dalam rangka menjadikan manusia lain menjadi beradab. Sebenarnya ideologi tersebut bertujuan untuk menutupi tindakan kolonialisme dan imperialisme.

Bila dicermati, westernisasi berperan sebagaimana halnya agama, yakni untuk menciptakan suatu masyarakat yang teratur, seperti yang dikatakan Emile Durkheim, "*the ideal of society is the heart of religion*" (Olmeadow, 1994 : 10). Meski demikian, kaum sekuleris memandang agama hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi bukan ideologi dalam pengertian sebenarnya karena yang mereka namakan ideologi adalah hasil pemikiran manusia untuk melakukan suatu revolusi (perubahan).

Kaum sekuler terpecah menjadi dua blok besar, kapitalisme dan komunisme. Mereka pun tidak mempunyai pendirian yang meyakinkan terhadap agama. Ketika Karl Marx (1818-1883) dan pendukungnya dari kelompok sekuler kiri mengembangkan filsafat materialisme, yakni sejarah digerakkan oleh faktor ekonomi, Durkheim dan kawan-kawan berargumen bahwa agama merupakan bentuk fenomena sosial yang paling awal. Pertentangan itu melahirkan liberalisme dan komunisme pada abad ke-19; yang keduanya sebenarnya bertumpu pada faktor kekuatan materi (ekonomi), bedanya adalah kaum liberalis/kapitalis menekankan penguasaan ekonomi pada individu, sedangkan kaum komunis memberikan kekuasaan ekonomi pada masyarakat. Bila ditelusuri lebih dalam lagi maka keduanya bersifat politis dan ideologis, sebagaimana yang dikatakan Albert Camus, *The revolution of the twentieth century ... based on economies, ... is primarily political and ideological* (Vaticiotis, 1972 : 8).

Hal ini menunjukkan bahwa di era modern, ideologi merupakan sarana yang menentukan bagi keberhasilan suatu revolusi karena memang ideologilah yang memberikan justifikasi terhadap ide *the pleasure of the future*. Bahkan

pada dekade 1960-an dan 1970-an di Barat lahir kelompok strukturalis yang menggunakan ideologi sebagai pisau analisisnya terhadap segala perubahan sosial, setelah sebelumnya kaum sekuleris Barat mendeklarasikan abad ke-20 sebagai *the end of ideology*. Pendekatan ideologi tersebut menemukan justifikasinya dalam kasus Revolusi Islam Iran tahun 1979 karena tidak dapat dijelaskan dari sudut pandang kapitalisme maupun komunisme.

TRADISI TIDAK STATIS

Tradisi dan atau agama bukan sesuatu yang statis. Pernyataan ini dapat dicarikan kebenarannya melalui fakta sejarah peradaban Islam. Semua tahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan suatu revolusi dalam tradisi budaya Arab, namun demikian dalam melakukan revolusi tersebut Nabi tetap menggunakan struktur tradisi budaya yang baik untuk diisi dengan ruh semangat baru. Bertolak dari pandangan tersebut maka Al-Quran dipandang bukan sebagai kata benda (produk jadi), melainkan sebagai kata kerja, yaitu menempatkan Al-Quran dalam dialog dengan tradisi budaya pada waktu itu. Contohnya banyak sekali, namun dalam ruang tulisan yang terbatas ini hanya akan diangkat satu contoh, yakni ibadah haji.

Tradisi ibadah haji merupakan tiruan dari tindakan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS (Syamsu, 1983 : 5), dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut : “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji” (QS. 2 : 124). Ujian terhadap Ibrahim, diantaranya adalah membangun Ka’bah, membersihkan negara dari kemusyrikan, perintah mengorbankan anaknya (Ismail), menghadapi Raja Namrud. Ayat lain yang menjelaskan tindakan haji : tindakan sa’i antara bukit Shafa dan Marwa meniru Nabi Ibrahim (QS. 2 : 158); musim haji adalah Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah (QS. 2 : 197); berdzikir di Bukit Quzah di Muzdalifah (QS. 2 : 198); “Apabila kamu telah menyelesaikan

ibadah hajimu, maka berdzikirlah (dengan menyebut nama Allah), sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu (QS. 2 : 200). Adalah menjadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah setelah menunaikan ibadah haji lalu bermegah-megahan tentang kebesaran nenek moyangnya itu diganti dengan *dzikrulloh* (menyebut-menyebut nama Allah).

Nabi Muhammad SAW telah memelihara tradisi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS yang semula telah diselewengkan oleh Kaum Quraisy jahiliyah, dan Nabi melakukan inovasi terhadap isinya. Hal tersebut merupakan suatu keharusan sejarah, dimana tradisi juga harus bersifat dinamis terhadap faktor sejarah, ruang dan waktu. Bila tradisi tidak lagi bersifat dinamis, tradisi tersebut telah mati menjadi institusi sosial.

Tradisi Islam tidak hanya menekankan pada moral masyarakat, tetapi juga memberi tempat kepada kebebasan individu secara seimbang. Islam mempunyai dua dimensi, yakni dimensi horizontal berupa keinginan (*will*) dan dimensi verikal berupa intelektual (kebebasan individu). Dalam mewujudkan aspek keinginan tidak dengan pengorbanan (*sacrifice*), tetapi harus menurut hukum dari Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan keselamatan (*salvation*), baik di dunia maupun di akhirat (Schuon, 1986 : 30-31). Dalam hal ini Nabi Muhammad tidak mengubah secara radikal tradisi yang ada karena tujuannya tidak untuk menciptakan tata dunia baru, tetapi mendidik manusia tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai *salvation* (melalui kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan) (Schact, 1970 : 541). Melalui hukum (*syari'ah*) akan ditegakkan perdamaian dan keadilan di dunia supaya manusia dapat mencapai kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian pemerintahan yang adil merupakan inti dari ajaran revolusi dalam Islam.

Kuntowijoyo (1999a: 97) yakin bahwa Nabi berpikir secara dialektik. Hal itu ditunjukkan dan hadits-hadits yang tampaknya kontradiktif,

“Sebaik-baik tempat ialah masjid-masjid, dan sejelek-jelek tempat ialah pasar-pasar”, padahal Nabi dalam sebuah hadits yang lain memuji jual beli yang jujur dan baik (dan penghasilan dari tangan sendiri) sebagai mata pencaharian yang utama.

Diktum tersebut dalam konsepsi modern dapat dipararelkan dengan hukum dialektika Karl Marx (1818-1883) berupa *thesis-antithesis-synthesis*, sebagai suatu pola dalam sejarah peradaban manusia untuk mencapai kemajuan. Di dunia, sesuai dengan sifatnya yang tidak abadi, tidak ada tesis yang benar mutlak karena sangat ditentukan oleh dimensi, ruang, waktu dan sejarah. Hal itu merupakan keyakinan Ibn Khaldun (1332-1406), seorang pemikir Islam terkenal, seperti yang ditulis dalam *Muquddimah* bahwa tidak ada yang tetap di dunia ini, yang tetap adalah perubahan itu sendiri.

Perbedaan dalam Islam juga dapat dilihat dengan kaca mata dialektika Karl Marx tersebut sehingga tidak akan melahirkan konflik, pertentangan maupun peperangan. Bila hal itu disadari maka tidak akan ada klaim kebenaran mutlak, yang akan menghalangi wacana dialog. Kelahiran Islam sendiri dapat dilihat dari kaca mata Karl Marx tersebut. Islam lahir dari perut Tradisi Ibrahim yang telah melahirkan agama Yahudi dan Kristen. Karena Yahudi sangat menekankan pada aspek hukum/rasio (*law/syariah*) maka muncul *antithesis* berupa Kristen yang lebih menekankan aspek keyakinan/emosi (*belief*), baru kemudian lahir Islam untuk memenuhi hasrat kemanusiaan yang menggabungkan aspek rasio dan emosi sekaligus. Hukum dialektika tersebut akan terus mengalir dalam Islam sendiri sejalan dengan berubahnya ruang dan waktu.

Anthony Giddens (1999 : 2), pakar dan penasehat PM Inggris Tony Blair, berkeyakinan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang statis:

It is a myth to think of traditions as impervious to change. Traditions evolve over time, but also can be quite suddenly altered or transformed. If I can put it this way, they are invented and reinvented. Some traditions, of course, such as associated with the great religions, have last for hundreds of years ..Yet whatever continuity there is in such doctrines goes along with many changes, even revolutionary changes, in how they interpreted and acted upon.

Giddens (1999) berpendapat bahwa tradisi mempunyai dua karakteristik, yakni ritual dan pengulangan. Tradisi menjadi milik dari suatu kelompok, masyarakat atau perkumpulan, namun bukan berarti bahwa individu tidak mengikuti tradisi atau kebiasaan-kebiasaan. Hal itu untuk menunjukkan bahwa tradisi bukanlah kualitas tingkah laku individu. Dalam kenyataannya tradisi memberikan penjelasan tentang suatu kebenaran dan tradisi mempunyai pengawal yang mengklaim telah memahami makna yang sebenarnya dari kitab-kitab suci atau simbol-simbol lain yang digunakan dalam upacara bersama. Namun Giddens yakin bahwa peranan tradisi semakin berkurang dalam era modern karena manusia menjadi semakin kritis terhadap tradisi yang tidak relevan dengan modernisasi dan globalisasi.

Pernyataan Giddens tersebut secara implisit mengindikasikan bahwa tradisi itu tidak akan dihilangkan. Sementara Cooper (1982: 7-9) menandakan bahwa hidup selalu diliputi dan dikontrol oleh tradisi; tidak terkecuali orang modern yang menghadapinya secara pasif. Tradisi merupakan gudang kekayaan masa lampau, tetapi mempunyai makna untuk masa sekarang. Tradisi berguna untuk membentuk identitas suatu bangsa. Tradisi menampakkannya dalam bentuk simbol-simbol. Makna suatu simbol (dikategorikan sebagai tradisi dengan t kecil) dapat menjadi usang dalam gerak ruang dan waktu, namun bentuknya tetap dan dapat dilakukan

interpretasi ulang sesuai dengan *primordial source* (dikategorikan Tradisi dengan T besar).

Kaum tradisional seperti Rene Guenon, R Schuon, Titus Bukhard dan Nasr percaya bahwa Tradisi bersinonim dengan *perennial philosophy* yang bersifat abadi, universal dan tidak dapat diganti. Mereka membedakan antara Tradisi dengan tradisi (Oidmeadow, 1982:73).

Tradition : the primordial wisdom, or Truth, immutable and unformed; "tradition" : a formal embodiment of Truth under a particular mythological or religious guise which is transmitted through time, or the vehicle for the transmission of this formal embodiment; or the process of transmission itself.

Oidmeadow (1982: 75) sependapat dengan Marco Palis bahwa tradisi mempunyai peran yang sama dengan agama karena tradisi memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu:

...wherever a complete tradition exists this will entail the presence of four things, namely: a source of ...Revelation; a current of influence or Grace issuing from that source and transmitted without interruption through a variety of channels; a way of "verification" which, when faithfully followed, will lead the human subject to successive positions where he is able to "actualise" the truths that Revelation communicates; finally there is the formal embodiment of tradition in the doctrines, arts, sciences and other elements that together go to determine the character of a normal civilisation.

TRADISI DAN MODERNISASI DI INDONESIA

Modernisasi itu terkait dengan faktor tradisi/budaya (Halimi, 1998 : 11). Kita tidak dapat meniru begitu saja modernisasi di Amerika untuk

diterapkan di Indonesia karena menyangkut masalah kebudayaan. Modernisasi bukan sekedar masalah ekonomi. Hal ini yang menjadi pandangan dominan di Indonesia, sehingga ketika Amerika mengalami krisis ekonomi maka imbasnya sampai ke Indonesia. Sementara krisis ekonomi tidak menimpa negara yang melakukan modernisasi sesuai dengan kebudayaannya seperti India dan China. Ketika krisis ekonomi di Amerika sudah berakhir, Indonesia masih mengalami krisis ekonomi karena krisis di Indonesia bukan saja krisis ekonomi tetapi juga krisis kebudayaan sekaligus.

Modernisasi tidak hanya menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi saja karena hal itu tidak akan melahirkan suatu negara modern. Negara modern lahir dari anak kandung modernisasi setelah hamil lama dari abad ke-15 sampai 18 sehingga harus dilakukan operasi yang dinamai Revolusi Perancis 1789. Modernisasi juga menyangkut suatu gerakan politik dan ekonomi dari sekelompok orang yang mengatasnamakan pendukung modernisasi. Kalau hanya sekedar sistem ekonomi maka Revolusi Industri di Inggris telah berhasil merombak struktur ekonomi ke arah sistem ekonomi modern yang bertumpu pada perkembangan industri.

Modernisasi lebih diberi arti dalam masalah politik untuk menciptakan negara modern. Ini terjadi pertama kali di Perancis sehingga dikenal dengan Revolusi Perancis 1789. Ini yang diyakini sebagai revolusi dalam pengertian modern, karena telah berhasil merombak struktur politik feodal dengan struktur politik modern yang memperkenalkan konsep pembagian kekuasaan. Sistem politik modern yang demokratis akan menjamin berkembangnya potensi individu secara optimal dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengertian modernisasi berkembang terus sesuai dengan faktor ruang dan waktu, serta sejarah para pendukung gerakan modernisasi itu sendiri. Untuk menghargai Revolusi Perancis yang telah berhasil mendirikan negara modern maka abad ke-18 dikenal dengan Abad Ideologi karena suatu revolusi tidak akan terjadi kalau tidak ada ideologi yang memberikan justifikasi. Modernis percaya bahwa revolusi merupakan hasil dari perencanaan manusia, bukan hasil dan faktor-faktor impersonal, sehingga mereka tidak mengakui peran agama dalam revolusi. Abad Ideologi diperpanjang sampai abad ke-19, dimana muncul ideologi yang mendasarkan pada aspek ekonomi bahwa ekonomilah sebagai faktor yang menggerakkan sejarah, sehingga lahir sistem kapitalisme dan sosialisme (komunisme). Pada abad ke-20 dikenal dengan *the end of ideology* karena menurunnya peranan politik di negeri-negeri Barat; dan sebaliknya ekonomi menjadi sumber kesetiaan para modernis dan lahirlah konsep pluralisme setelah berakhirnya Perang Dunia II (Rahardjo, 1988: 61).

Dari analisa sejarah pemaknaan terhadap modernisasi di Barat seperti tersebut di atas, maka kita juga harus memberi makna modernisasi sesuai dengan konsep kebudayaan di Indonesia. Mungkin pola modernisasi di Inggris dan Jepang yang memberi tempat bagi struktur politik lama dapat dijadikan model modernisasi di Indonesia. Kecenderungan memperhatikan tradisi juga sejalan dengan arah modernisasi di dunia Barat sekarang ini yang mulai bertumpu lagi kepada aspek ekonomi dalam masyarakat plural. Para pengambil keputusan hendaknya mengedepankan perkembangan sektor ekonomi daripada aspek politik. Apalagi modernisasi dijadikan alat politik.

Dalam masalah keterkaitan tradisi dan modernisasi maka Jepang merupakan contoh yang baik. Modernisasi dijalankan menurut sistem tradisi

yang ada untuk menjamin aspek pemerataan hasil modernisasi. Modernisasi bukan mencabut seseorang dan akar budayanya, melainkan dilakukan terhadap isi (*feeling*) dan struktur (*form*) budaya sehingga modernisasi merupakan gerakan budaya dan masyarakat sekaligus. Dengan demikian harus dilakukan transformasi budaya dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri melalui berfungsinya lembaga-lembaga budaya untuk memberi makna baru terhadap simbol dan norma yang dianut oleh masyarakatnya (Kuntowijoyo, 1999a: 5-7),

Sejalan dengan kecenderungan *the end of ideology* di dunia Barat maka modernisasi di Indonesia jangan memfokuskan kepada perjuangan ideologi politik dan ekonomi), tetapi menekankan kepada model pembangunan ekonomi yang sesuai dengan tradisi budaya masyarakat Indonesia yang majemuk untuk menjamin stabilitas politik. Contohnya, proses pembangunan di Indonesia tidak menekankan kepada persaingan di antara berbagai ideologi yang saling bersaing seperti Islam, kapitalis-liberal, sosialisme, komunisme; melainkan dengan menciptakan model pembangunan yang sesuai dengan tradisi suatu daerah tertentu. Integrasi tradisi dan modernisasi akan menciptakan dua arah perkembangan ekonomi, yaitu dari kelompok modernis (industri) dan dari kelompok tradisional (*agraris*). Hendaknya pemerintah memberi kesempatan yang sama kepada sistem kebudayaan dari kelompok modernis maupun tradisional untuk melakukan dialektika karena dalam suatu negara modern juga tidak sepenuhnya bertumpu kepada sektor industri. Suatu negara dikatakan negara modern bila sektor industri dapat menyumbangkan 30 persen terhadap *Gross National Product (GNP)*. Hal itu berarti bahwa sektor pertanian juga harus kuat sehingga kebijakan sektor pertanian juga harus mendapatkan prioritas.

Untuk menuju masyarakat modern maka peranan pendidikan sangat mutlak. Sistem pendidikan yang dianut sangat mempengaruhi ke-

berhasilan dari modernisasi tersebut. Dalam menyusun sistem pendidikan harus berlandaskan kepada tradisi bangsa untuk menghindari eksese-eksese negatif peradaban Barat. Tradisi mempunyai peranan yang penting dalam mewariskan dan menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya bangsa, sehingga bila timbul gejolak dalam proses modernisasi dapat diatasi secara memuaskan karena tradisi (budaya) merupakan suatu sistem pengetahuan dari suatu masyarakat yang mencakup simbol-simbol beserta dengan konsep-konsep epistemologi yang berguna untuk mengintegrasikan berbagai proses modernisasi ke dalam sebuah sistem yang koheren (Kuntowijoyo, 1999a : xi).

Perhatian terhadap tradisi menjadi sangat penting karena peradaban modern tidak melahirkan manusia yang lebih bijak, sekalipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang mencapai puncaknya, sehingga peradaban modern tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Memang benar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan barometer bagi kecanggihan suatu peradaban, namun hal itu tidak menjamin bagi lahirnya peradaban yang bermoral. Hal itu terjadi karena fondasi kebenaran yang berdasarkan *sensore system of truth* (kebenaran inderawi) sangat dangkal. Premisnya adalah *the true reality and value is sensory*. Karena yang dijadikan pusat dari kosmos adalah manusia maka kebenaran juga menjadi monopoli mereka yang punya kekuasaan sehingga berakibat kepada malapetaka di bumi ini (Maarif, 1994: 1-4).

KESIMPULAN

Modernisasi bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi terkait dengan tradisi budaya bangsa, Dalam merumuskan kebijakan pembangunan

harus memperhatikan tradisi budaya bangsa supaya modernisasi yang dijalankan selaras dengan tenaga penggerak dalam masyarakat Indonesia. Tradisi merupakan sistem pengetahuan beserta dengan metodologinya dan menjadi identitas suatu bangsa, yang dapat digunakan untuk mengatasi gejala yang timbul dalam proses modernisasi. Di sini tradisi dapat mencegah terciptanya peradaban immoral, sedangkan modernisasi akan melengkapi kemampuan tradisi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat untuk menciptakan kecanggihan peradaban.

Modernisasi di Indonesia hendaknya berbeda dengan modernisasi di Barat karena perbedaan tradisi/budaya. Karenanya tidak mengherankan bila krisis ekonomi dunia yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997 masih belum teratasi karena modernisasi di Indonesia tidak berdasarkan tradisi bangsa yang menjadi identitasnya. Krisis dunia tidak berdampak luas di Jepang, India dan China karena mereka melakukan modernisasi dalam rangka mengembangkan tradisi supaya lebih rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, J.C. (1994). "Symbolism, the Universal Language". Dalam Harry Oidmeadow, *Philosophy of Religion: An Anthology of Readings*. Melbourne: LaTrobe University. Northants: Aquarian Press.
- Dabashi, Hamid. (1993) *Theoh~ of Disconfent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran*. New York and London: New York University Press.
- Departenien Agama RI. (1989). *Al-Qvr 'an dan Terjemahan*. Semarang: TohaPutera.

- Giddens, Anthony, (1999). "Tradition", http://news2.thdo.bbc.co.uk/hi/english/static/evcnts/reith_99/week3/week3.htm. Diakses 27 April 1999.
- Halimi, Sergei. (1998). "Ziberal Dogma Shipwrecked". *The Guardian Weekly*. October.
- Kuntowijoyo. (1999a), *Budaya dan Musyurahat*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. (1999b). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Bentang.
- Laksono, P.M. (1985). *Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjag Mađa University Press.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (1994). *Filsafat Sejarah*. Yogyakarta : Jur. Pendidikan Sejarah.
- Olmeadow, Harry. (1982). *Frithjof Schuon and the Meaning of the Tradition*. Sydney: University of Sydney (Unpublished Thesis).
- _____. (1994). *Philosophy of Religion : An Antology of Readings*. Melbourn : La Trobe University.
- _____. (tt). *Introducing Religions Studies : Antology*. Melbourn : La Trobe University.
- Pickering, W.S.F. (ed). (1975). *Durkheim on Religion*. London and Boston : Routledge & Kegan Paul.
- Rahardjo, M. Dawam (1988). *Esei-esei Ekonomi Politik*. Jakarta : LP3ES.
- Schacht, Joseph. (1970). "Law and Justice". In *The Cambridge History of Islam*. Cambridge : Cambridge University Press.

- Shuon, F. (1986). *Understanding Islam*. London : Mandala Books.
- Syamsu, Nazwar. (1983). *Al-Qur 'an tentang Makkah dan Ibadah Haji*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tillich, Paul. (1994). "Religious Symbols and Our Knowledge of God". In Harry Olmeadow. *Philosophy of Religion : An Antology of Readings*. Melbourne : La Trobe University.
- Vatikiotis; P.J. (1972). *Revolution in the Middle East and Other Case Studies*. London : George Allen and Unwin Ltd.